

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada Bab I dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran peneliti dalam menemukan masalah yang dikaji dan mencari solusinya dalam penelitian ini. Lebih lanjut, disajikan identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta struktur organisasi disertasi yang memuat sistematika penulisan disertasi.

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Konseling multikultural mengubah cara pandang dalam memahami hubungan konseling. Konseling multikultural adalah pendekatan integratif yang menggunakan teori dasar kultural sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik konseling (Berger & McLeod, 2006). Lebih lanjut, Locke (dalam Gladding, 2009) konseling multikultural merupakan salah satu tipe konseling yang menekankan konselor dan konseli yang berbeda budaya sebagai hasil dari suatu kehidupan bermasyarakat yang memiliki lingkungan sosial, budaya dan etnik yang unik.

Menurut Pedersen, Draguns, Lonner, & Trimble (2002) konseling multikultural mengubah banyak paradigma yang telah mengendalikan profesi selama 50 tahun terakhir. Senada dengan hal tersebut, Essandoh (1996) menyatakan bahwa konseling multikultural mewakili sebuah paradigma baru dalam profesi konseling—sebuah “tekanan keempat”. Tiga tekanan pertama dalam profesi yang diidentifikasi sebagai perkembangan psikoanalisis, behavioristik, dan psikologi humanistik secara berturut-turut.

Namun, Essandoh menyatakan bahwa proses aplikasi teori untuk praktek berjalan lambat, begitu juga yang terjadi di Indonesia. Aktivitas profesi konselor dalam praktek di sekolah diharapkan menemukan teori baru, dan mengadaptasi teori yang ada serta konsep dalam praktek konseling

seorang konselor menurut Essandoh (1996) sebaiknya melakukan apa yang diperlukan adalah lebih banyak tindakan, yaitu dengan mengaplikasikan teori dan konsep dalam praktek konseling. Ketika hal ini terjadi pada skala yang besar, konseling multikultural dan terapis akan memiliki legitimasi dari tiga tekanan pertama, dan hal ini akan membuka pintu untuk penelitian yang lebih memiliki informasi untuk menggerakkan konseling multikultural dari sebuah posisi dimensi keempat ke salah satu tekanan keempat.

Lebih lanjut, Locke & Faubert (2003) menyatakan sebenarnya mungkin dikarenakan tekanan keempat yang akan menjadi instrumen dalam mengubah profesi pada milenium mendatang. Konsep konseling multikultural telah berubah dari tahun ke tahun, dan berlanjut masih berubah terus menerus. Misalnya, beberapa orang telah mempertimbangkan bahwa konseling berkaitan dengan multikultural, dan telah mengambil sebuah perspektif universal untuk konseling multikultural. Senada dengan pernyataan Locke & Faubert, Patterson (1996) menyatakan bahwa penekanan yang berlebihan sekarang untuk konseling multikultural pada perbedaan budaya dan konseling, khususnya budaya yang berfokus pada teknik tertentu dengan seorang konselor dapat merubah gaya, teknik, dan metode untuk memenuhi karakteristik yang diperkirakan dari konseli yang memiliki budaya berbeda.

Di Indonesia, khususnya pada profesi konselor diharapkan pula memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan konseling multikultural. Mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor memiliki karakteristik budaya yang berbeda pula dengan konseli. Mahasiswa bimbingan dan konseling dilatih untuk mengembangkan Empati Budaya Inklusif (EBI) dengan menyesuaikan pada perkembangan kompetensi konseling multikultural (ACA 2002, Arredondo, 1999; Arredondo dkk, 1996; Roysicar, Arredondo, Fuertes, Ponterotto, & Toporek, 2003; Roysicar, Sandhu, & Bibbins, 2003). Perkembangan kompetensi multikultural berdasarkan ahli-ahli di atas mewakili standar minimal yang diperlukan mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor jika mereka akan bekerja secara efektif dengan konseli yang berbeda budaya, menggambarkan

sikap dan keyakinan, pengetahuan, dan keahlian dalam tiga dimensi, yaitu: (1) kesadaran diri konselor terhadap anggapan, nilai-nilai, dan prasangka-prasangka, (2) pengetahuan pandangan dunia mengenai konseli yang berbeda budaya, dan (3) keterbiasaan dengan strategi intervensi dan tekniknya.

Penelitian perkembangan kompetensi konseling multikultural di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya. Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi (2013) menunjukkan bahwa konselor sekolah dalam menghadapi beragam perbedaan konseli perlu “mengubah persepsi mereka” belajar mengenai konseling dan konsultasi terhadap beragam populasi, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang budaya lain, bentuk rasisme, dan mampu berperan sebagai agen perubahan sosial. Keragaman mengakibatkan kebutuhan layanan konseling berbasis multibudaya bagi konselor profesional. Lebih lanjut, Kertamuda (2011) menyatakan bahwa konselor sebagai pendidik psikologis memiliki peran strategis dalam menghadapi keragaman dan perbedaan budaya. Penting bagi konselor memiliki kompetensi, kualitas, dan *guidelines* konselor serta teknik konseling dalam menghadapi konseli yang berbeda budaya. Berdasarkan hal tersebut di atas, mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor memerlukan pengetahuan dasar keragaman dari konselinya, dan perbedaan budaya.

Literatur tentang kompetensi multikultural menunjukkan bahwa program pendidikan konselor yang efektif menggunakan berbagai metode pengajaran, baik secara praktis dan klinis (Vereen, Hill, & McNeal, 2008). Para peneliti mulai mempelajari pengaruh kedua pendekatan, percampuran budaya dan pelatihan empati budaya inklusif secara komprehensif tentang pengembangan kompetensi konseling multikultural.

Tiga dimensi kompetensi konseling multikultural yang perlu dimiliki oleh seorang konselor multikultural, yaitu: (1) pengetahuan (*awareness*), (2) sikap, dan (3) keterampilan. Salah satu dari tiga dimensi tersebut menurut Geilen dkk (2008) adalah *awareness*. Untuk memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan kemajemukan serta keberagaman

budaya. *Awareness* adalah dimensi yang menjadi faktor utama bagi seorang konselor untuk memiliki kesadaran budaya (*cultural awareness*). Kesadaran budaya merupakan suatu hal yang penting untuk saling peduli, dan peka terhadap perbedaan yang ada. Sue dkk (dalam Bodenhorn dkk, 2005) mengemukakan bahwa: (1) menyadari dan sensitif atau memiliki kepekaan terhadap budaya yang dimiliki diri sendiri, (2) memiliki pemahaman tentang rasial, dan warisan budaya serta bagaimana hal tersebut secara personal dan profesional mempengaruhi pemahaman konselor dan bias yang akan terjadi dalam proses konseling, dan (3) memiliki pengetahuan tentang pengaruh sosial terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka kesadaran budaya perlu untuk dimiliki oleh konselor dalam pelaksanaan proses konseling yang dilakukannya terhadap konseli yang memiliki budaya yang berbeda dengan dirinya.

Konseling multikultural dalam konteks lembaga pendidikan menurut Erford (2004) lebih menitikberatkan pada relasi layanan konselor profesional dengan peserta didik yang didalamnya terdapat penghargaan terhadap konteks budaya. Konselor dalam proses layanan konseling multikultural dituntut secara penuh memahami aspek bahasa, nilai, keyakinan, kelas sosial, tingkat akulturasi, ras dan etnis dari konseli, dan selalu menggunakan teknik serta intervensi konseling yang konsisten dengan nilai budaya.

Peran konselor dalam proses memandirikan individu merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang diberikannya, konselor tentu perlu untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konselinya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal yang ada dalam dirinya sendiri dan juga konselinya. Kesadaran akan perbedaan yang dimiliki antara keduanya menjadi salah satu cara yang penting untuk menjaga hubungan dan interaksi dalam proses bimbingan dan konseling.

Ekspektasi kinerja konselor dalam memberikan layanan konseling akan selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keberagaman, serta mengedepankan

kemashalatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pelayanan profesional menjadi “*the reflective practitioner*” (Depdiknas, 2008). Konselor yang peka terhadap keberagaman budaya mampu menyikapi konselinya secara empatik, baik budaya konselor sendiri dan budaya konseli yang diberikan pelayanan. Lebih lanjut, Kartadinata (2011) menyatakan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah perjumpaan kultural yang terkait dengan kehidupan sosio-antropologi-kultural konseli.

Seorang konselor perlu memahami budaya mereka sendiri dalam rangka untuk bekerja dengan konseli tanpa memaksakan nilai-nilai mereka, menyinggung konseli, atau perilaku nonverbal konseli yang salah diinterpretasikan. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau ketidakmengertian, maka konselor harus memiliki kesadaran akan perbedaan yang terjadi tersebut agar konseli dapat merasa nyaman. Kesadaran akan perbedaan budaya yang dimiliki konselor dapat membantu dan mendidik tidak hanya konselor, namun juga konseli terkait dengan budaya masing-masing. Sehingga hal tersebut dapat membantu keduanya untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah konseli atau dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan konseli.

Sangat penting bagi konselor memiliki kompetensi yang akan memberikan arah dalam pelaksanaan konseling dengan keberagaman budaya konselinya. Refleksi terhadap praktek konseling tentu akan melibatkan pemahaman dan kesadaran konselor terhadap budaya yang dimilikinya dan konselinya. Seorang konselor pada saat praktek bimbingan dan konseling sering menemukan keyakinan dan sistem nilai yang berbeda dengan konseli. Situasi seperti itu membuat konselor menghadapi dilema apakah konselor akan menerima kepercayaan dan sistem nilai konseli.

Beberapa faktor yang dapat membuat seorang konselor berperilaku tepat dalam kaitannya dengan perspektif nilai menurut Sanyata (2006) bahwa konselor: (1) memiliki kualitas pribadi yang positif, (2) mampu memahami

masalah etika dalam konseling, (3) memiliki kesadaran budaya dalam konteks keberagaman budaya, (4) dapat membangun hubungan efektif antara konselor dengan konseli, dan (5) dapat memahami prinsip kepercayaan dan sistem nilai konseli.

Sedangkan menurut Kartadinata (2005) bahwa sebagai pendidik psikologis, konselor harus memiliki kompetensi dalam hal: (1) memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Ini berarti seorang konselor harus mampu mengakses, mengintervensi, dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, lingkungan, sekolah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian individu di dalam sistem; (2) menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar maupun intra pribadi dan lintas budaya. Kemampuan menguasai teknik-teknik treatment tradisional yang terdiri atas konseling individual dan kelompok harus diperluas ke arah penguasaan teknik-teknik konsultasi, pelatihan dan pengembangan organisasi; (3) menguasai strategi dan teknik asesmen yang memungkinkan dapat dipahaminya keberfungsian psikologis individu dan interaksinya dengan lingkungan; (4) memahami proses perkembangan manusia secara individual maupun secara sosial. Sebagai seorang profesional, konselor harus mampu mengkonseptualisasikan dan memfasilitasi proses pertumbuhan melalui pengembangan interaksi optimal antara individu dengan lingkungan. Konselor harus bergerak melintas dari konsep statistik tentang “kecocokan individu-lingkungan kearah alur individu-lingkungan” yang menekankan kepada keterikatan pengayaan pertumbuhan antara individu dengan suatu lingkungan belajar; (5) memegang kokoh regulasi profesi yang terinternalisasi ke dalam kekuatan etik profesi yang mempribadi; dan (6) memahami dan menguasai kaidah-kaidah dan praktek pendidikan.

Kompetensi yang penting bagi seorang konselor berdasarkan pernyataan di atas dengan dapat memahami perkembangan manusia, kompleksitas manusia yang memiliki keragaman baik dari konteks individu maupun sosial budayanya. Oleh karena itu, konselor secara umum (tidak

hanya untuk konselor multikultural), begitu juga mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor dapat memiliki kesadaran budaya perlu memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan pemahaman individu dan lingkungan.

Kesadaran budaya (*cultural awareness*) merupakan salah satu dimensi yang penting untuk dimiliki oleh mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor. Dimensi ini perlu dimiliki oleh mahasiswa bimbingan dan konseling agar paham dan sadar bahwa faktor budaya yang dimilikinya (ras, gender, nilai-nilai, dan kelas sosial) akan mempengaruhi perkembangan diri dan pandangan terhadap dirinya. Oleh karena itu, perlu bagi mahasiswa bimbingan dan konseling untuk mengetahui bahwa nilai dan perilaku yang dimilikinya akan berpengaruh kepada orang lain. Hal tersebut secara substansial akan berdampak pada perkembangan manusia dan proses konseling (Geilen dkk, 2008). Begitu juga pada konseli dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor.

Kesadaran budaya yang perlu dimiliki konselor tentu diawali juga dengan pemahamannya terhadap perbedaan budaya konseli. Vacc dkk (2003) menyatakan bahwa kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat ke luar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya serta kebiasaan budaya yang masuk. Lebih lanjut, Wunderle (2006) menyebutkan bahwa kesadaran budaya (*cultural awareness*) sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Implikasi dari kesadaran budaya terhadap pemahaman kebutuhan untuk mempertimbangkan budaya, faktor-faktor penting dalam menghadapi situasi tertentu.

Untuk mengembangkan kesadaran budaya (*cultural awareness*), konselor sebaiknya meningkatkan penghargaan diri terhadap perbedaan budaya. Konselor harus meniadakan stereotipe yang ada dalam dirinya dan mempunyai persepsi yang jelas bagaimana pandangannya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kesadaran budaya menurut Brown & Williams (2003) dapat meningkatkan kemampuan konselor untuk menghargai

secara efektif dan pemahaman yang sesuai tentang perbedaan budaya dengan konseli.

Perbedaan budaya antar konselor dan konseli dapat dipahami konselor dengan memiliki kesadaran budaya. Patterson (2004) menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis perbedaan budaya konseli, yaitu: *accidental* dan *essential*. Perbedaan budaya, etnik dan ras merupakan suatu hal yang terjadi dengan tidak sengaja (misalnya tempat dilahirkan). Namun, konseli juga memiliki kesamaan pada hal-hal yang utama atau hal yang pokok (*essential*) sebagai manusia. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kualitas dasar dalam pelaksanaan konseling. Rogers (Patterson, 2004) menyebutkan 5 kualitas dasar konselor. *Pertama, Respect*. Menghargai konseli merupakan hal yang penting bagi konselor. Hal ini termasuk memiliki kepercayaan kepada konseli dan memiliki asumsi bahwa konseli mampu untuk mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri (termasuk selama proses konseling berlangsung), konseli memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan memutuskan serta memecahkan masalahnya.

*Kedua, Genuinenes*. Konseling merupakan hubungan yang nyata. Konselor perlu untuk memiliki kesungguhan dalam memberikan konseling dan juga adalah sosok yang nyata. Selain itu konselor harus sesuai dengan diri sesungguhnya (kongruensi) berarti konselor betul-betul menjadi dirinya tanpa kepalsuan. *Ketiga, Empathic understanding*. Pemahaman yang empati lebih dari sekedar pengetahuan tentang konseli. Akan tetapi pemahaman yang melibatkan dunia dan budaya konseli secara mendalam. Senada dengan Patterson (2004) bahwa kemampuan untuk menunjukkan empati pada budaya secara konsisten dan hal-hal yang memiliki makna merupakan variabel penting untuk melibatkan konseli.

*Keempat, Communication of empathic, respect and genuineness to the client*. Kondisi seperti ini penting untuk dipersepsi, diakui, dan dirasakan oleh konseli. Persepsi tersebut akan mengalami kesulitan jika konseli berbeda dengan konselor baik dari budaya, ras, sosial ekonomi, umur, dan jender. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memahami perbedaan tersebut.

Sue (Patterson, 2004) menyatakan bahwa pemahaman terhadap perbedaan budaya baik secara verbal maupun nonverbal akan sangat membantu dalam proses konseling.

*Kelima, Structuring.* Salah satu elemen penting yang terkadang tidak disadari oleh konselor adalah struktur atau susunan dalam proses konseling. Vontress (Patterson, 2004) menyebutkan bahwa hubungan dengan seorang profesional yang menempatkan tanggung jawab utama kepada individu untuk memecahkan masalahnya sangat sedikit. Pekerjaan konselor dalam proses konseling sebaiknya memiliki makna, dan mengartikan peran konselor pada konseli. Konselor sebaiknya menyatakan bahwa apa, bagaimana dan mengapa konselor bermaksud melakukan bimbingan dan konseling. Kegagalan untuk memberikan pemahaman peran konselor di awal proses bimbingan dan konseling dapat menghasilkan ketidakpahaman antara keduanya.

Selanjutnya, kesadaran budaya konselor dalam menghadapi perbedaan nilai-nilai menjadi faktor penentu efektifitas proses bimbingan dan konseling yang diberikannya. Bishop (Kertamuda, 2009) menyebutkan pedoman (*guidelines*) yang perlu dimiliki konselor terkait dengan perbedaan nilai-nilai, yaitu:

*Pertama*, konselor membantu konseli agar merasakan bahwa nilai-nilai yang dimilikinya dapat diterima selama proses konseling berlangsung. Peran konselor adalah menyakinkan konseli bahwa perasaan konseli terkait dengan nilai-nilai yang dimilikinya dapat diterima oleh konselor. *Kedua*, konselor memberikan pandangan kepada konseli bahwa nilai-nilai keagamaan yang dimiliki sebagai bagian dalam memecahkan masalah yang dihadapi konseli, tidak hanya sebagai bagian dari masalah. Konselor perlu memiliki pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan mental konseli sama dengan dukungan sosial yang diberikannya. *Ketiga*, konselor *harus* meningkatkan diri dan memiliki pendidikan tentang budaya, nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan mempraktekkan; berusaha untuk mengerti bagaimana isu-isu terkait dengan hal tersebut diintegrasikan melalui teori psikologi dan praktek konseling.

*Keempat*, konselor mengikuti aktifitas-aktifitas di masyarakat yang dapat meningkatkan interaksinya dengan orang-orang yang berbeda secara budaya maupun agama. *Kelima*, konselor mampu mengeksplor dan mengevaluasi nilai-nilai personal yang dianutnya. Penilaian diri (*self-examination*) merupakan hal penting karena: (a) setiap orang memiliki kelemahan-kelemahan (*blind spots*) yang dapat menimbulkan bias terkait dengan nilai, (b) kita perlu menyadari terhadap bias-bias yang dimiliki saat menghadapi konseli, (c) proses klarifikasi terhadap nilai-nilai personal dapat membantu konselor mengidentifikasi masalah atau nilai-nilai yang dimiliki konseli, (d) perjuangan konselor untuk memahami nilai-nilainya dapat memberikan pemahaman yang baik dan menghargai proses konseling bersama konseli.

*Keenam*, konselor harus hati-hati dengan perlawanan atau penolakan (*resistance*) yang dimilikinya terhadap permasalahan konseli. Konselor yang tidak bersedia terbuka untuk berdiskusi dan berintegrasi dengan nilai-nilainya, maka proses konseling dapat beresiko dalam penyampaian pesan kepada konseli. Konseli akan mulai mempercayai konselor diawal proses konseling. Oleh karena itu, konselor perlu memberikan kesan bahwa memang konselor dapat dipercaya oleh konseli; dan (7) konselor perlu mengembangkan bahasa yang sederhana dan jelas agar dapat berkomunikasi dengan konseli tentang nilai-nilai keagamaan baik itu yang dimiliki konselor maupun konseli.

Beberapa kualitas konselor di atas, memang memiliki dasar yang utama (*essential*) dalam menghadapi konseli secara umum, namun ada hal-hal yang secara budaya tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, terkait dengan elemen yang terakhir, yaitu: *structuring*, bagi beberapa budaya di Indonesia pentingnya seorang profesional dalam memberikan bantuan melalui proses bimbingan dan konseling masih sangat terbatas sehingga untuk melakukan sesuai dengan kriteria tersebut perlu “penggalan lebih mendalam” bagi seorang konselor ataupun mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor.

Segala kompetensi, kualitas dan *guidelines* tidak akan efektif dalam proses konseling jika konselor tidak memiliki metode dan pendekatan yang sesuai dalam menghadapi konseli yang multikultural. Patterson (2004) menyampaikan kritikan bahwa konselor tidak membutuhkan kompetensi konselor untuk konseli multikultural. Namun yang dibutuhkan adalah metode dan pendekatan efektif untuk semua konseli dan sifatnya sebagai sistem yang universal dalam konseling. Berdasarkan hal tersebut di Indonesia pun penting bagi konselor untuk memiliki kesadaran budaya dan menempatkannya secara tepat dalam interaksinya dengan konseli adalah hal yang penting dengan memperhatikan perbedaan budaya, khususnya di daerah DKI Jakarta yang beragam etnis budaya.

Kompetensi konselor secara umum menggarisbawahi kompetensi budaya, dengan menggunakan teknik-teknik konseling dan mengintegrasikannya ke dalam intervensi yang bermakna pada konseli. Menurut Heppner dkk (2008) kompetensi konseling multikultural akan meningkatkan efektifitas konseling dan kemampuan profesi konselor yang ditujukan pada berbagai kebutuhan kesehatan mental pada populasi yang berbeda di seluruh dunia. Kehadiran (*be present*), perhatian, peduli, dukungan emosional, tidak menghakimi, empati, mendengarkan dan juga cinta dari konselor pada saat proses konseling (Geilen dkk, 2008).

Kompetensi konselor multikultural menurut Sue & Sue (1990) terdiri dari: (1) *Counselor Awareness of Own Cultural Values and Biases* (Kesadaran konselor terhadap nilai-nilai budaya dan masalahnya sendiri); (2) Konselor menyadari bahwa latar belakang budaya dan pengalaman yang dimilikinya akan mempengaruhi sikap, nilai, perasaan dan keyakinan pada saat proses konseling; (3) *Counselor Awareness of Client's Worldview* (Pemahaman konselor terhadap cara pandang konseli yang berbeda-beda). Konselor harus memiliki pemahaman yang baik tentang sistem sosial politik yang berkembang saat ini; dan (4) *Developing appropriate intervention strategies and techniques* (mengembangkan intervensi strategi dan teknik-teknik konseling yang sesuai). Konselor harus memiliki kemampuan

keterampilan konseling dalam pemahaman terhadap variasi respon verbal dan nonverbal. Konselor membutuhkan praktek dan merasa nyaman dengan kemampuan yang dimiliki.

Ada pun hasil penelitian konseling multikultural yang dilakukan oleh Worthington dkk (2007) menemukan bahwa konselor yang memiliki *Multicultural Counseling Competencies* mampu meningkatkan dan mengembangkan proses konseling. Hasil positif yang didapat melalui respek kepada persepsi konselor, konseli, hubungan antara konseli dan konselor. Upaya pengembangan konselor multikultural menurut Pedersen (2002), yaitu konselor: (1) diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami gaya komunikasi seorang individu; (2) perlu untuk memiliki sensitifitas terhadap bahasa nonverbal yang dikemukakan oleh konseli; (3) diharapkan memiliki pemahaman terhadap perbedaan budaya dan Bahasa; (4) perlu memiliki ketertarikan terhadap budaya orang lain dan tidak hanya pada budaya sendiri; (5) juga harus peka terhadap mitos-mitos dan streatipe yang berkembang di budaya-budaya lain; dan (6) mampu untuk mengartikulasi elemen yang terdapat pada budayanya sendiri agar dapat membedakan antara dirinya sebagai konselor, dan dirinya sebagai individu yang memiliki budaya sendiri dan konseli yang berbeda dari konselor.

Supriatna (2010) menemukan bahwa untuk menjadi efektif, seorang konselor yang terlibat dalam konseling *multicultural* harus mampu: (1) memiliki penghargaan terhadap apa yang dirasakan, dipahami, diterima, dihargai oleh konseli yang diungkapkan baik secara verbal atau non verbal; (2) perasaan empati, melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di tempat orang lain, untuk memahami titik pandang orang lain; (3) mengakui bahwa observasi, pengetahuan atau persepsi tentang benar atau kebenaran hanya untuk dirinya sendiri dan tidak menggeneralisasikan untuk konseli; (4) menolak menghakimi dan mengingatkan sampai dia memiliki cukup informasi dan memahami dunia konseli; (5) kemampuan mereaksi terhadap sesuatu yang baru, perbedaan dan waktu, situasi yang tidak dapat diramalkan dengan sedikit ketidaknyamanan atau iritasi; (6) memiliki kesabaran dan

ketabahan ketika tidak memungkinkan untuk mengerjakan suatu dengan segera.

Salah satu kompetensi yang dimiliki oleh konselor multikultural dengan memiliki empati. Empati berasal dari kata Yunani "empathia," yang berarti memiliki wawasan reaksi orang lain. Dalam filsafat, menurut Eklund (2011) empati telah digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami orang lain dan sebagai merawat orang lain. Selama tahun 1900-an konsep, yang disebut "Einfuhlung" dalam bahasa Jerman, dikembangkan dan disesuaikan dengan aesthetician Jerman. Masih ada banyak definisi dan operasionalisasi konsep empati digunakan (misalnya, Hoffman, 1977; Rappaport & Chinsky, 1972; Rogers, 1975; Singer dkk., 2006; Truax, 1972).

Empati merupakan pemahaman terhadap perilaku manusia. Cohen and Strayer (1996) yang menyatakan bahwa empati sebagai pemahaman dan berbagi dengan orang lain dalam keadaan emosi (afektif) atau konteks (kognitif). Pengertian empati ini diadopsi oleh Jolliffe & Farrington (2006) sebagai pengertian *skala empati dasar*. Sedangkan, Corey (2008) menyatakan bahwa empati berhubungan erat dengan kemampuan menerima dan memahami kerangka pemikiran (*reference*) konseli, tanpa keterlibatan konselor secara emosional dengan konseli yang dibantu. Pemahaman empati yang akurat menyatakan bahwa konselor akan memahami perasaan konseli seperti jika mereka sendiri yang mengalaminya tanpa harus tenggelam didalamnya, artinya konselor tidak terlibat secara emosional dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Empati juga berkaitan dengan kemampuan melihat isu-isu secara positif dari perspektif lain, misalnya pemahaman tentang budaya lain di luar budaya dirinya, yang akan menjadi dasar untuk menghargai, menerima dan mengakui nilai-nilai yang dimiliki oleh konseli sesuai dengan budayanya, tanpa pemikiran-pemikiran lain yang akan mempengaruhi penilaian konselor.

Empati banyak digunakan namun jarang ditelaah dengan teknik psikoanalisis adalah penggunaan empati dan keterampilan mendengarkan yang baik. Mendengarkan dengan empati memungkinkan konselor untuk

mulai membangun hubungan dengan konseli yang sementara mengungkapkan informasi masih sedikit, jika ada, tentang dirinya sendiri. Hal tersebut memungkinkan para konselor untuk mengatur hubungan transferensi.

Sedangkan untuk pemahaman empati yang paling banyak diteliti dan dibicarakan tentang unsur hubungan konseling, empati atau pemahaman yang mendalam mengenai konseli adalah konsep Rogers tentang ketiga elemen yang penting dalam hubungan membantu. Pemahaman seperti ini dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, termasuk keakuratan yang mencerminkan makna dan pengaruh apa yang diungkapkan oleh konseli; menggunakan metafora, analogi, atau gambar visual untuk menunjukkan konseli bahwa ia adalah mendengar secara akurat, atau hanya menganggukkan kepalanya atau dengan menyentuh konseli secara lembut pada saat konseli dalam kesakitan yang mendalam. Pengakuan dari kesulitan konseli semacam itu mengatakan bahwa pengalaman dunia terapisnya “seolah-olah itu miliknya sendiri, tetapi tanpa pernah kehilangan ”seolah-olah” berkualitas (Rogers, 1957). Dengan kata lain, konselor adalah “dengan” konseli; “mendengar” konseli; memahami konseli sepenuhnya, dan mampu mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada konseli.

Selama bertahun-tahun, penjelasan Rogers tentang mendengarkan dengan empati telah ditafsirkan dan sering dikemas ke dalam apa yang sekarang banyak kita sebut “refleksi perasaan,” atau “menirukan apa yang dikatakan konseli.” Salah satu artikel yang terakhir yang ditulis oleh Carl Rogers menyuarkan amarah terhadap beberapa cara konsepnya tentang pemahaman empatik yang telah ditafsirkan. Melihat khususnya penggunaan istilah “refleksi dari perasaan” dan “menirukan” pernyataan konseli. Rogers menyatakan bahwa dia tidak pernah mengartikan konselor untuk meniru apa yang dikatakan konseli, tetapi untuk menggunakan semua kemungkinan jalan untuk menunjukkan kepada konseli bahwa konselor memahami caranya membuat makna.

Rogers mencatat bahwa tanggapan empati yang terbaik kepada konseli adalah mereka yang di dalamnya ada konselor mampu untuk

“subceive” membolak-balikan perasaan yang disadari oleh konseli. Sebagai lawan dari perasaan yang menafsirkan bahwa konselor berpikir, konseli mungkin akan mengalami perasaan bimbang, berarti bahwa konselor merasakan perasaan terdalam dari konseli, perasaan yang konseli mungkin tidak menyadari. Hanya ketika konseli setuju bahwa konseli mengalami perasaan-perasaan konselor “on target” dengan responnya.

Beberapa aspek teknis yang membentuk empati dapat dibagi dalam beberapa dimensi berikut (Manstead & Hewstone, 1996; Shechtman, 2003; Miville, dkk., 2006; Hojat, dkk., 2005) yakni: empati kognitif atau lazim dikenal sebagai penempatan perspektif (*perspective-taking*), empati afektif (*emphatic concern*), dan distress diri (*personal distress*). *Perspective-taking* merupakan kemampuan spontan seseorang untuk mengadopsi atau memahami kerangka pikir orang lain, sedangkan unsur afektif dari empati lebih mengarah pada apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap keadaan orang lain; termasuk pula didalamnya keadaan simpati dan perhatian penuh terhadap orang lain. Komponen yang lain, yakni distress diri (*personal distress*) merupakan suatu keadaan cemas, khawatir, dan tertekan yang dialami oleh seseorang sebagai reaksi negatif terhadap situasi antarpribadi yang dialaminya.

Green (1998) menegaskan bahwa kemampuan empati menurut model Barat yang berlaku tidak universal dalam masyarakat multikultural dengan keragaman etnis. Begitu juga bangsa Indonesia yang berada di Asia Tenggara memiliki ras-etnis budaya yang beragam dari sabang sampai marauke. Selanjutnya, Green (1998) menyatakan bahwa empati adalah kemampuan memiliki akses ke orang lain berupa pengalaman dalam bentuk perasaan dan pikiran, maka konselor harus memiliki pengalaman praktis tertentu dari konteks budaya dari mana perasaan dan pikiran berasal. Oleh karena itu, empati tanpa pengetahuan tentang latar belakang budaya dan pengalaman praktis dengan berbagai kelompok etnis tidak dapat menyebabkan *treatment* yang memuaskan dan adil serta dapat membantu perilaku, khususnya pada mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor di DKI Jakarta.

Sangat mungkin menurut Hoffman (2000) bahwa kemampuan untuk memiliki empati budaya terhadap orang lain akan meningkat jika konselor memahami dalam hal etnis, gender, usia, atau latar belakang.

Empati dapat menangkis sikap dan perilaku bermusuhan dan dengan demikian meningkatkan hubungan antara kelompok etnis yang berbeda dan subkultur (Litvack-Miller, MacDougall, & Romney, 1997). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Davis (1994) telah menunjukkan hubungan antara kurangnya empati dan sikap negatif serta perilaku agresif. Penelitian lain telah menunjukkan bahwa kurangnya sebuah empati mengarah ke permusuhan terhadap kelompok etnis (Stephan & Finlay, 1999). Empati dapat mengurangi intoleransi, konflik, diskriminasi, peningkatan pemahaman, rasa hormat dan toleransi antara orang-orang dengan sama serta berbeda latar belakang etnis dan budaya (Wang dkk., 2003). Konsep mewujudkan empati budaya mencakup empati perasaan terhadap orang-orang dari berbagai etnis dan kelompok budaya. Menurut Batson dkk (1997) empati adalah sifat yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan.

Menurut Kartadinata (2005) konselor dituntut kompeten dalam memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Konselor harus mampu mengases (menilai), mengintervensi, dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, sekolah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian individu dalam sistem. Tujuannya adalah tercapai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menghindari terjadinya konflik budaya yang terjadi karena adanya bias budaya dan stereotip budaya yang berbeda dengan budaya disekitarnya.

Konselor yang memahami budaya konseli akan mempelajari beragam budaya yang ada di Indonesia, tidak terkecuali mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta yang akan menjadi calon konselor nantinya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan yang multibudaya, khususnya budaya konseli di DKI Jakarta yang beragam suku atau etnis. Mahasiswa bimbingan dan konseling dituntut memiliki

karakteristik kepribadian konselor *multicultural*. Salah satu penyebab proses bimbingan dan konseling *multicultural* efektif atau tidak efektif dalam proses konseling adalah empati budaya (Rogers, 1975; Ridley & Lingle, 1996; Van Der Zee & Van Oudenhoven, 2000; Egan, 2002; Wang dkk., 2003; Ivey & Ivey, 2007; Pedersen, Crethar dan Carlson, 2008; Rasoal dkk., 2011).

Adapun penelitian yang mendukung pernyataan di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Fidiyaningrum (2006) bahwa mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor dituntut memiliki kompetensi, salah satunya empati yang tinggi. Berdasarkan hasil pengolahan empati pada mahasiswa angkatan 2005 program studi Bimbingan dan Konseling (BK) yang berjumlah 64 orang, 55 orang memiliki kecenderungan empati tinggi, dan 9 orang lainnya berkecenderungan empati sedang melalui Penelitian Tindakan diperoleh peningkatan walaupun tingkat perkembangannya sangat kecil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa bimbingan dan konseling memerlukan pengembangan empati lebih optimal. Untuk menumbuhkan empati dirinya, seorang konselor harus memiliki *mindset* lintas budaya yaitu: fleksibilitas dan *adaptability*; toleransi dan kesabaran; *sense of humor*; keingintahuan yang tinggi secara intelektual dan sosial; kepercayaan diri dan kontrol; dan kemampuan untuk berkomunikasi.

Sedangkan penelitian empati budaya menurut Rasoal (2011) memiliki implikasi penting untuk interaksi antarbudaya itu telah difokuskan hampir secara eksklusif pada kemampuan empati antara individu dengan yang sama latar belakang etnis dan budayanya. Tampaknya bijaksana untuk memahami konteks empati di antarbudaya dengan mengambil perspektif seseorang dari budaya yang berbeda, mungkin lebih sulit daripada mengambil perspektif seseorang dengan latar belakang budaya yang sama. Wawasan empati budaya menurut Ridley dan Lingle (1996) memungkinkan konselor untuk memiliki sikap yang lebih terbuka dan memberikan yang diperlukan seperti pengetahuan untuk bekerjasama secara sukses dengan konseli berlatar belakang etnis yang berbeda. Empati budaya melibatkan pendalaman empati

manusia dengan rasa kebersamaan dan pemahaman dari perbedaan nilai dan harapan dari pertukaran budaya.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di lima Universitas, yaitu: (1) Universitas Negeri Jakarta, (2) Universitas Prof. DR. Hamka, (3) Universitas Islam As-syafi'iyah, (4) Universitas Katolik Atmajaya, dan (5) Universitas Kristen Indonesia dengan menggunakan Skala Empati Dasar (SED) menghasilkan 16.91 % (50 mahasiswa) berada pada kategori tinggi dalam empati, yaitu: ditunjukkan dengan sangat mampu memahami perasaan dan menempatkan posisi diri sendiri dalam keadaan orang lain, sedangkan pada kategori sedang mencapai 67.98% (199 mahasiswa) yang berarti mahasiswa bimbingan dan konseling cukup mampu memahami perasaan dan menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain. Untuk kategori rendah, data menunjukkan 15.11% (45 mahasiswa) yang berarti mahasiswa bimbingan dan konseling belum mampu memahami perasaan seseorang dan menempatkan posisi diri dalam keadaan perasaan orang lain.

Sedangkan untuk mengukur Skala Empati Budaya (SEB) diperoleh 12.24 % (36 mahasiswa) berada pada kategori tinggi dalam empati budaya yang berarti mahasiswa bimbingan dan konseling sangat mampu memahami perasaan dan ekspresi empati, melakukan prespektif empati, menerima perbedaan budaya dan sangat memiliki kesadaran empati, sedangkan pada kategori sedang mencapai 65.65% (193 mahasiswa) yang berarti mahasiswa bimbingan dan konseling mampu memahami perasaan dan ekspresi empati, melakukan prespektif empati, menerima perbedaan budaya dan sangat memiliki kesadaran empati. Untuk kategori rendah, data menunjukkan 22.11% (36 mahasiswa) yang berarti mahasiswa bimbingan dan konseling belum mampu memahami perasaan dan ekspresi empati, melakukan prespektif empati, menerima perbedaan budaya dan sangat memiliki kesadaran empati.

Berdasarkan data dari lima Universitas diperoleh kategori rendah baik pada Skala Empati Dasar (SED) dan Skala Empati Budaya (SEB), dengan kategori rendah pada BES data menunjukkan 15.11% (45 mahasiswa) yang

berarti mahasiswa BK belum mampu memahami perasaan seseorang dan menempatkan posisi diri dalam keadaan perasaan orang lain. Sedangkan kategori rendah pada SEB data menunjukkan 22.11% (36 mahasiswa) yang berarti mahasiswa bimbingan dan konseling belum mampu memahami perasaan dan ekspresi empati, melakukan prespektif empati, menerima perbedaan budaya dan sangat memiliki kesadaran empati. Kategori rendah baik SED dan SEB yang diperoleh dari studi pendahuluan, maka diperlukan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta.

Empati Budaya Inklusif (EBI) tidak hanya mencakup hubungan antara konselor dan konseli, tetapi juga banyak hubungan dalam konteks budaya konseli. Para peneliti sebelumnya menyatakan bahwa tingkat inklusif dapat juga menjadi ukuran hasil untuk konseling empatik (Pedersen, 1991; Pedersen & Ivey, 1993). Model empati pada penelitian ini adalah budaya inklusif karena berusaha untuk mengambil banyak aspek-aspek konteks budaya konseli. Pernyataan tersebut didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Miville, dkk (2006) tentang *Mental health counselor qualities for a diverse clientele: linking empathy, universal-diverse orientation, and emotional intelligence*. Adapun hasil penelitiannya bahwa kecerdasan emosional adalah moderat terkait dengan tiga dimensi empati: (1) mengambil perspektif, (2) perhatian emosional, dan (3) keprihatinan pribadi. Dengan demikian, kemampuan untuk memantau dan membedakan emosi diri dan orang lain dikaitkan dengan kemampuan untuk berempati, terutama mengambil perspektif orang lain serta merasa kekhawatiran emosional bagi orang lain.

Constantine & Gainor (2001) menemukan hasil yang serupa dengan konselor sekolah, menunjukkan bahwa 'menempatkan diri dalam sepatu orang lain' mampu melibatkan perasaan secara akurat dan menanggapi emosi serta pikiran. Dengan demikian, gagasan "mendengarkan mendalam" adalah relevan; agar konselor menghargai kedalaman cerita konseli mereka, mereka

harus mampu untuk melihat atau membayangkan reaksi emosional, mungkin tak terucap oleh konseli mereka, dengan isi narasi yang sedang disajikan.

Penelitian ini untuk membangun empati budaya inklusif dengan menerapkan perspektif hubungan yang berpusat pada konteks budaya konseli yang lebih besar khususnya mahasiswa bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi DKI Jakarta. Permasalahan yang sering dihadapi oleh konselor pada saat menghadapi konseli yang berbeda budaya yaitu: Apa yang terjadi ketika konteks budaya konseli diabaikan? Apa yang terjadi ketika konselor mengurangi perbedaan antara budaya konseli? Konselor cenderung untuk memaksakan konseli atau *self-reference* sendiri tentang kriteria apa yang normal atau perilaku konseli yang sesuai tanpa memperhatikan kriteria konseli. Para konselor yang mengasumsikan hanya ada satu konseli di dalam ruangan sudah dalam kesulitan. Setiap "virtual" konseli membawa banyak budaya pada wawancara konseling. Budaya ini bisa lebih nyata kepada konseli dari konselor. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, permasalahan yang sering dihadapi oleh calon konselor/mahasiswa bimbingan dan konseling ketika mengaplikasikan empati budaya inklusif pada konseli adalah pengetahuan yang kurang holistik tentang budaya konseli, dan bias budaya antara calon konselor/mahasiswa bimbingan dan konseling dan konseli.

Penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kualitas empati budaya inklusif calon konselor. Adapun makna dari inklusif menurut Pedersen (dalam Corey, 2012) yaitu: "he believes culture centered interventions depend on an inclusive definition of culture as well as a broad definition of counseling process." Empati budaya inklusif merupakan intervensi terhadap keberagaman budaya secara spesifik pada proses konseling. Lebih lanjut Pedersen (2010) menyatakan bahwa inklusif berasal dari definisi beragam budaya, kesehatan, dan hubungan yang saling membantu. Sedangkan untuk pengembangannya dengan: (1) kesadaran, (2) pengetahuan, dan (3) keterampilan. Adapun empati budaya inklusif yang

dikembangkan pada penelitian ini terdiri dari pengembangan: (1) penerimaan afektif, (2) penerimaan kognitif, dan (3) pemahaman intelektual isu multikultural.

Keterampilan Empati Budaya Inklusif (EBI) dalam berbagai literatur diyakini sebagai keterampilan dan modal dasar bagi mahasiswa bimbingan dan konseling dalam menggeluti profesi sebagai konselor kelak di masa yang akan datang dan merupakan keterampilan praktis yang perlu ditampilkan dalam setiap layanan bimbingan dan konseling, namun juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kompetensi kepribadian calon konselor/mahasiswa bimbingan dan konseling.

Salah satu kompetensi hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa di perguruan tinggi adalah kompetensi afektif, selain kompetensi kognitif (pemahaman) dan psikomotorik (keterampilan). Tidak terkecuali mahasiswa bimbingan dan konseling. Adapun dari tujuan peningkatan kemampuan afektif adalah menolong individu untuk menguasai berbagai keterampilan hidup (*life skills*) melalui program-program terstruktur yang diselenggarakan dalam kelompok-kelompok. Pendekatan bimbingan kelompok yang digunakan oleh mahasiswa bimbingan dan konseling tidak hanya belajar untuk menguasai materi secara kognitif, tetapi juga mereka dapat belajar meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk pengembangan kepribadian.

Ada banyak alasan menurut Jacobs dkk (2012) untuk menggunakan pendekatan kelompok, yaitu: (1) kelompok lebih efisien dan menawarkan lebih banyak sumber daya serta sudut pandang, dan (2) memiliki perasaan kesamaan, pengalaman yang tergabung, kesempatan untuk berlatih perilaku baru, kesempatan untuk umpan balik, kesempatan untuk belajar mendengarkan dan mengamati orang lain, pendekatan untuk kehidupan nyata, dan menegakkan komitmen.

Senada dengan hal tersebut di atas, bimbingan kelompok menurut Harpine (2008) adalah salah satu kegiatan layanan yang paling banyak dipakai karena lebih efektif. Banyak orang yang mendapatkan layanan

sekaligus dalam satu waktu. Layanan bimbingan kelompok juga sesuai dengan teori belajar karena mengandung aspek sosial, yaitu belajar bersama. Para peserta bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI akan berbagi ide, cara berpikir, perasaan dan keterampilan empati budaya inklusif serta saling mempengaruhi untuk berkembang menjadi manusia yang memahami perbedaan budaya.

Dengan mengenali, memahami dan menyadari bagaimana budaya dapat mempengaruhi proses bimbingan kelompok. Kesadaran budaya akan mendukung mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor dalam mengembangkan pemahaman empati dasar, empati budaya dan empati budaya inklusif terhadap konseli. Selanjutnya, Ridley (dalam Chung & Bemak, 2002) menekankan pentingnya pemahaman empati. Ridley lebih lanjut menambahkan bahwa ketika konselor latihan keterampilan konseling multikultural mereka dengan konseli mereka, sangat penting untuk menyediakan mereka dengan pedoman. Peneliti menggunakan panduan bimbingan kelompok sebagai berpegang pada pedoman yang menekankan keterampilan, kesadaran diri, dan pengetahuan budaya.

Brammer dkk (1993) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan afektif tersebut, pendidik perlu suatu revolusi dan transformasi bidang kesehatan mental. Revolusi dan transformasi kesehatan mental yang dimaksud adalah upaya preventif dan ekstensif menolong masyarakat termasuk mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan pada tingkatan yang semakin tinggi, khususnya lewat penguasaan berbagai keterampilan hidup (*life skills*) bersama, komunikasi antar pribadi, dan pertumbuhan pribadi. Keterampilan-keterampilan psikologis yang dimaksud adalah *life skills*, yaitu mendengarkan dan memahami secara empatik (*emphatic understanding*), menyampaikan pesan, mengungkapkan pikiran dan perasaan (*self disclosure*), resolusi konflik, membuat perencanaan (*strategic planning*), dan *problem solving*, mengambil keputusan (*decision making*), *coping* terhadap aneka *stressor*, menjalani

berbagai transisi hidup dan perkembangan secara berhasil, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah dan perguruan tinggi.

Pada konteks program studi bimbingan dan konseling, keterampilan-keterampilan hidup yang dimaksud bukan lagi sebagai kompetensi tambahan yang bersifat komplementer bagi kompetensi kognitif, tetapi merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dicapai oleh mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai bagian dari proses pengembangan kepribadian dan kecakapan profesional. Beberapa kecakapan tersebut diantaranya seperti empati dan perilaku prososial. Empati merupakan salah satu dari beberapa kualitas kepribadian konselor yang harus dimanifestasikan dalam relasi konseling (Patterson, 1996). Bahkan empati juga merupakan komponen utama yang menentukan efektivitas layanan konseling (McLeod, 2001).

Fitur utama dari kompetensi konselor budaya menurut Pedersen (1997), yaitu: kesadaran diri, pengetahuan tentang budaya, dan keterampilan. Keyakinan ini konsisten dengan kompetensi konseling multikultural yang dikembangkan oleh Sue, Arredondo, dan McDavis (1994). Untuk menjadi kompeten secara budaya, sangat penting untuk memiliki pengetahuan budaya. pengetahuan budaya dianggap sebagai koalisi konsep teoritis dan pengalaman hidup (Kiselica & Maben, 1999). Oleh karena itu, Peneliti membuat upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang budaya dan pengalaman hidup pada mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta sebagai calon konselor dengan menggunakan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penelitian ini berupaya mengidentifikasi lebih lanjut tentang rancangan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan salah satu eksplorasi awal yang ditujukan untuk mengetahui model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling. Pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan dari model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif

mahasiswa bimbingan dan konseling adalah peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga mahasiswa bimbingan dan konseling nantinya akan memiliki: (a) penerimaan afektif yang berkaitan dengan memahami diri sendiri dan orang lain yang berbeda secara kultural, (b) penerimaan kognitif berhubungan dengan sensitifitas budaya dalam proses konseling, dan (c) pengembangan pemahaman intelektual isu multikultural yang relevan.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Mahasiswa bimbingan dan konseling diharapkan mempelajari empati budaya inklusif secara lebih mendalam untuk membantu melaksanakan tugas sebagai pemberi layanan bimbingan dan konseling yang profesional. Akses terhadap pemberian jasa layanan konseling yang prima tidak mungkin tercapai tanpa memiliki pemahaman yang mendasar mengenai empati, empati budaya, dan empati budaya inklusif karena tidak adanya pemahaman mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor dalam memahami orang lain dari berbagai budaya, dan membina hubungan yang kuat dengan orang tersebut sebagai konseli. Jika hal tersebut tetap dibiarkan, maka akan melahirkan konselor yang tidak berkualitas dan profesional dalam memahami keragaman budaya konselinya. Hal tersebut justru tidak sesuai harapan menurut Belkin (dalam Winkel, 1997) pembahasannya mengenai kualitas pribadi konselor yang mempengaruhi efektifitas pekerjaan konselor.

Konselor dituntut untuk menjadi pemberi layanan yang profesional dan memiliki karakteristik yang ideal. Salah satu karakteristik untuk menjadi konselor profesional dipengaruhi dengan adanya sejumlah kualitas kepribadian terutama dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Kepribadian konselor yang ideal sudah tentu mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terutama dalam membangun *raport* dan berkonseling.

Tugas seorang konselor dalam melaksanakan konseling yang efektif berpengaruh pada hubungan dalam proses konseling dengan modal utama kemampuan memahami orang lain salah satunya adalah empati dan komunikasi. Konselor yang memiliki tingkat empati tinggi dianggap menjadi

salah satu faktor kemudahan dalam membina hubungan yang erat dalam proses konseling. Konselor yang memiliki tingkat empati tinggi juga tidak terlepas dari proses selama masa pendidikan formal yakni pada jenjang perguruan tinggi, walaupun memang diluar pendidikan formalnya, kemampuan ini juga dapat diasah. Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi memang sudah lebih mengkhusus dalam mengasah satu bidang kajian sebagai program studi yang diambil.

Jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi menuntut 3 kompetensi menurut Rahman (2006), yaitu: kompetensi afektif, kognitif dan psikomotor. Kompetensi afektif sebagai salah kompetensi hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa di perguruan tinggi, selain kompetensi kognitif (pemahaman) dan psikomotorik (keterampilan). Tujuan dari peningkatan kemampuan afektif ini salah satunya menolong individu menguasai berbagai keterampilan hidup penting (*life skills*) melalui program-program terstruktur yang diselenggarakan dalam kelompok tertentu. Mahasiswa tidak hanya belajar untuk menguasai materi secara kognitif, tetapi juga mereka dapat belajar meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk pengembangan kepribadian.

Begitu pula, hal tersebut diterapkan dalam pendidikan program studi bimbingan dan konseling untuk menghasilkan lulusan konselor yang memiliki keterampilan sosial. Ketiga kompetensi yang harus dicapai tersebut juga erat kaitannya dalam menghasilkan kualitas kepribadian konselor yang profesional. Ketiga kompetensi tersebut menuntut lulusan di program studi bimbingan dan konseling untuk memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor yang baik dalam menunjang bidang pekerjaan yang profesional.

Peneliti melakukan observasi dengan membandingkan kurikulum serta muatan mata kuliah tidak jauh berbeda yang diberikan kepada kelima univertitas yaitu: (1) Universitas Negeri Jakarta, (2) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, (3) Universitas Islam Assafi'iyah, (4) Universitas Katolik Atmajaya, dan (5) Universitas Kristen Indonesia sehingga dengan alasan tersebut peneliti melakukan studi pendahuluan hanya

pada Universitas Negeri Jakarta. Peneliti juga menanyakan bagaimana karakteristik empati dasar, empati budaya dan empati budaya inklusif pada setiap mahasiswa bimbingan dan konseling serta kepada ketua jurusan atau program studi bimbingan dan konseling setiap Universitas dalam peninjauan awal melakukan permohonan izin untuk penelitian. Namun, setiap ketua jurusan atau program studi bimbingan dan konseling tidak memiliki jawaban yang pasti hanya berargumen pada klasifikasi sedang atau rata-rata. Berdasarkan hal inilah peneliti tertarik untuk menemukan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “ **Model bimbingan kelompok yang efektif untuk mengembangkan empati budaya inklusif (Studi Pengembangan Penerimaan Afektif, Penerimaan Kognitif, Pemahaman Intelektual Isu Multikultural Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di DKI Jakarta) ?**” Adapun secara terperinci pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum empati dasar dan empati budaya mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta?
  - a. Aspek empati dasar dan empati budaya apa sajakah yang berada pada pencapaian rata-rata skor empati dan empati budaya tinggi?
  - b. Aspek empati dasar dan empati budaya apa sajakah yang berada pada pencapaian rata-rata skor empati dan empati budaya sedang?
  - c. Aspek empati dasar dan empati budaya apa sajakah yang berada pada pencapaian rata-rata skor empati dan empati budaya rendah?
2. Bagaimanakah empati budaya inklusif dapat dikembangkan dalam *setting* bimbingan kelompok pada mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta?
3. Apakah ada pengaruh dari berbagai faktor (jenis kelamin, suku ayah-ibu, dan universitas) terhadap empati dasar dan empati budaya mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta?

4. Seperti apakah rumusan model hipotetik bimbingan kelompok yang dihasilkan efektif untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor empati dasar dan empati budaya untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji terbatas?
  - a. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor aspek penerimaan afektif pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji terbatas?
  - b. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor aspek penerimaan kognitif pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji terbatas?
  - c. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor aspek pemahaman intelektual isu multikultural pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji terbatas?
6. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor empati dasar dan empati budaya untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji luas?
  - a. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor aspek penerimaan afektif pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji luas?
  - b. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor aspek penerimaan kognitif pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji luas?
  - c. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor aspek pemahaman intelektual isu multikultural pada kelompok eksperimen setelah diberikan

perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol pada *setting* uji luas?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menghasilkan rumusan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta.

#### **2. Tujuan Khusus Penelitian**

Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengkaji dan memperoleh gambaran teoritis dan empiris mengenai: (a) dihasilkannya sebuah model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta yang efektif, dan (b) diketahuinya tingkat keefektifan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta.

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu;

1. Signifikansi penelitian dari segi teori dapat menghasilkan rancangan model bimbingan kelompok yang dapat digunakan untuk mengembangkan empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menghasilkan alternatif teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan model empati budaya inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta.
2. Signifikansi penelitian pada sisi yang praktis, penelitian ini dapat membantu mahasiswa bimbingan dan konseling untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai empati budaya inklusif sebelum praktek di Sekolah dengan beragam karakteristik budaya konseli yang ada.

### **E. Struktur Organisasi Disertasi**

Untuk mengetahui gambaran dari penelitian ini, maka struktur organisasi disertasi terdiri atas lima bab, yaitu: Bab 1 adalah pendahuluan yang menyajikan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi disertasi.

Bab II adalah Kajian Pustaka Bimbingan Kelompok untuk Mengembangkan Empati budaya inklusif Mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang didalamnya diuraikan tentang: (1) Konsep Empati Budaya Inklusif, terdiri dari: (a) empati (pengertian empati, aspek skala empati dasar, proses empati, dan alasan pengtingnya menggunakan empati), (b) empati budaya (pengertian budaya; konsep empati budaya yaitu pengertian empati budaya, aspek skala empati budaya; dan hambatan-hambatan dalam empati budaya, (c) empati budaya inklusif (pengertian empati budaya inklusif, mengembangkan empati budaya inklusif, konselor dengan keterampilan empati budaya inklusif; (2) Konsep Bimbingan Kelompok, terdiri dari: (a) pengertian bimbingan kelompok EBI, (b) tujuan bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI, (c) manfaat bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI, (d) peran pemimpin kelompok untuk mengembangkan EBI, (e) karakteristik pemimpin kelompok untuk mengembangkan EBI, (f) waktu dan tempat bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI, (g) peserta kelompok untuk mengembangkan EBI, (h) teknik-teknik bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI, dan (i) tahapan bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI; (3) Mahasiswa Bimbingan dan Konseling sebagai Calon Konselor EBI; (4) Penelitian Relevan; dan (5) Model Bimbingan Kelompok untuk Mengembangkan EBI Mahasiswa Bimbingan dan Konseling.

Bab III adalah metode penelitian yang didalamnya diuraikan tentang: (1) Desain Penelitian, (2) Lokasi dan Subjek Penelitian, (3) Definisi Operasional Variabel, (4) Instrumen Penelitian, (5) Pengembangan Instrumen Penelitian, (6) Teknik Pengumpulan Data, (7) Metode Analisi Data, (8) Prosedur dan Tahapan Penelitian (Studi Pendahuluan, Pengembangan dan Validasi Model, Revisi dan Desiminasi Model).

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian memaparkan hasil: (1) studi pendahuluan, (2) rancangan program hipotetik,

(3) pengembangan dan validasi produk, serta (4) gambaran efektifitas produk. Sedangkan pembahasan hasil penelitian memaparkan: (1) temuan penelitian, (2) keunggulan produk, (3) kelemahan/keterbatasan produk, (4) peluang implementasi produk, dan (5) tantangan implementasinya.

Bab V adalah kesimpulan dan rekomendasi yang didalamnya diuraikan tentang kesimpulan yang merujuk pada hasil penelitian, dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait untuk memanfaatkan hasil temuan dalam penelitian ini, atau menggunakan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan Empati Budaya Inklusif (EBI) mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta yang dihasilkan.